

Komunikasi Sosial dalam Mendorong Penetapan Kebijakan Publik HIV/AIDS

Hadi Suprpto Arifin, Ditha Prasanti, Ikhsan Fuady

Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Jatinangor-Sumedang Km 21 Bandung 45363

Email: hsadalong85@gmail.com

Abstract: *This research studies about the use of social communication process in encouraging public policy on HIV/AIDS prevention in Pangandaran, West Java, Indonesia. It is a qualitative research with action research as the method. The result indicates the existence of social communication form such as direct social communication, social communication using mass media, and functional social communication involving elements of social communication. The social communication process is seen through the coordination of local government with several related agencies and foundations who care about HIV/AIDS. This encourages Local Government of Pangandaran in determining local regulation on HIV/AIDS prevention in Pangandaran tourism area.*

Keywords: *HIV/AIDS, pangandaran, public policy, social communication.*

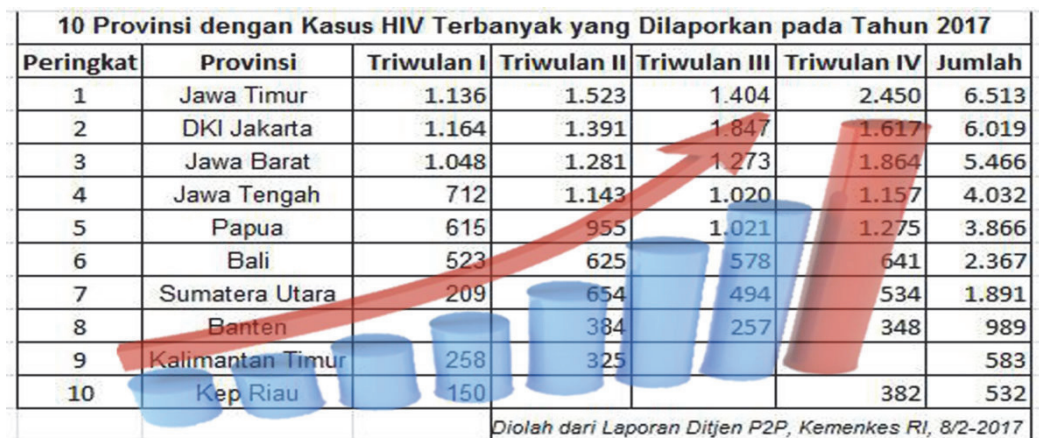
Abstrak: *Penelitian ini membahas proses komunikasi sosial dalam mendorong kebijakan publik mengenai Pencegahan HIV/AIDS di Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode action research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk komunikasi sosial yang dilakukan meliputi komunikasi sosial langsung, komunikasi sosial menggunakan media massa, dan komunikasi sosial fungsional yang melibatkan unsur-unsur komunikasi sosial. Proses komunikasi sosial ini terlihat pada koordinasi pemerintah daerah dengan beberapa dinas dan yayasan peduli HIV/AIDS yang mampu mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam menetapkan peraturan daerah mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.*

Kata Kunci: *HIV/AIDS, kebijakan publik, komunikasi sosial, pangandaran.*

Indonesia masih menghadapi masalah kesehatan yang harus segera diselesaikan karena memberikan dampak sosial dan menjadi kendala pembangunan. Istilah *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) memunculkan berbagai persepsi di benak setiap orang. HIV/AIDS kini sudah masuk ke salah satu kawasan wisata Pangandaran, Jawa Barat, yang menjadi destinasi wisatawan lokal maupun mancanegara. Data kasus HIV/

AIDS terbaru pada Gambar 1 adalah puncak gunung es yang belum menunjukkan data yang tidak terdeteksi.

Gambar 1 menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang berada di urutan ketiga dengan kasus HIV/AIDS terbanyak pada 2017 (Gunadi, 2017). Bahkan, pemerintah pun menjadikan masalah HIV/AIDS sebagai salah satu *Sustainable Development's Goals* (SDGs) hingga saat ini.



Gambar 1 Data Kasus HIV yang Dilaporkan pada 2017

Masalah kesehatan yang tidak kunjung selesai ini merupakan fakta berkembangnya epidemi HIV/AIDS yang juga sedang dihadapi oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Hasil penelitian Purnomo, Soeaidy, dan Hadi (2015, h. 43) mengungkapkan bahwa epidemi HIV/AIDS masih dinamis, sehingga jalur penyebarannya masih belum dapat diramalkan. HIV/AIDS secara nyata masih tersebar hampir di seluruh Indonesia hingga sekarang. Oleh karena itu, strategi dari berbagai pihak dibutuhkan untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran virus mematikan ini.

Sementara itu, hasil penelitian Wardo dan Rusmiyati (2015, h. 65) menjelaskan bahwa berbagai upaya penanggulangan yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya dukungan dari pihak yang terlibat di Komisi Penanggulangan HIV/AIDS, terutama kegiatan penelitian sebagai basis pengambilan kebijakan. Dinas pemerintahan daerah terkait belum memberi kesempatan sosialisasi pada siswa di jenjang pendidikan tingkat dasar, menengah, maupun atas. Kebijakan pencegahan HIV/

AIDS dapat menunjukkan hasil optimal jika melibatkan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun elemen masyarakat. Pengambilan kebijakan mengenai upaya penanggulangan HIV/AIDS pun hendaknya berbasis hasil penelitian, sehingga aktivitas penanggulannya tepat sasaran.

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, pada periode Januari-Juli 2017, menunjukkan bahwa 43 orang dinyatakan positif HIV/AIDS. Jumlah ini melonjak cukup drastis dibanding periode 2012-2016 dengan 61 kasus. Data ini menguatkan fenomena gunung es kasus HIV/AIDS.

Pangandaran sebagai salah satu kawasan wisata Provinsi Jawa Barat selayaknya mendapatkan perhatian khusus dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS masyarakat sekitarnya. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini bukan berarti menjauhi orang yang terinfeksi HIV/AIDS tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah di Pangandaran adalah menggunakan komunikasi sosial. Vera & Wihardi (2012, h. 61) menyatakan

bahwa komunikasi sosial merupakan suatu proses sosialisasi yang dapat menjamin kelangsungan hidup suatu kelompok sosial. Stabilitas sosial, tertib sosial, serta penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu masyarakat dapat tercapai melalui komunikasi sosial. Komunikasi sosial dapat memupuk, membina, dan memperluas kesadaran masyarakat. Komunikasi sosial pun dapat mendorong pemecahan masalah-masalah sosial melalui konsensus (Vera & Wihardi, 2012, h. 61).

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang bertema sama di atas. Keunikan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang merupakan kawasan wisata dan permasalahan HIV/AIDS di lokasi tersebut terus meningkat hingga 2017. Peneliti melihat upaya pencarian solusi dari masyarakat setempat melalui proses komunikasi sosial. Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkapkan proses komunikasi sosial dalam mendorong kebijakan publik penetapan peraturan daerah (perda) mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lokasi tersebut.

Komunikasi sosial menjadi poin penting untuk diteliti karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh beberapa dinas dan lembaga pemerintahan, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta masyarakat setempat adalah proses komunikasi sosial untuk mendorong munculnya kebijakan publik mengenai pencegahan HIV/AIDS.

Vera dan Wihardi (2012, h. 60) mendefinisikan komunikasi sosial sebagai

suatu proses interaksi antarperson atau antarlembaga melalui penyampaian pesan tertentu untuk menciptakan integrasi atau adaptasi sosial. Komunikasi sosial merupakan sebuah proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan pesan kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki oleh komunikator.

Definisi lain menyebutkan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses sosial dalam masyarakat. Proses sosial ini diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai individu, masyarakat, maupun organisasi dalam kehidupan bersama. Komunikasi sosial juga dapat diartikan menjadi suatu aktivitas komunikasi untuk tujuan integrasi sosial (Vera & Wihardi, 2012, h. 61).

Hasil penelitian sejenis yang dilakukan Fritantus dan Rukminingsih (2015, h. 175) menunjukkan rendahnya komunikasi antarinstansi pemerintah, tercukupinya sumber-sumber informasi, kurangnya disposisi dan lemahnya struktur organisasi yang berkaitan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mudah dipahami dan terjangkau semua lapisan masyarakat, serta adanya partisipasi dari swasta.

Sutaryo (2005, h. 25-26) menjelaskan bahwa unsur-unsur komunikasi dalam proses komunikasi sosial meliputi komunikator, amanat atau pesan yang disampaikan, media, komunikan, dan tanggapan (respons). Sedangkan jenis-jenis komunikasi sosial meliputi komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, komunikasi satu arah, komunikasi timbal balik, komunikasi

bebas, komunikasi fungsional, komunikasi individual, dan komunikasi massa. Sementara itu, fungsi komunikasi sosial adalah memberi informasi, bimbingan, dan hiburan.

Sementara itu, kebijakan publik, menurut Anderson (dalam Islamy, 2007, h. 19), adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sedangkan Dunn (dalam Nugroho, 2011, h. 298) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode multipel untuk meneliti dan berargumen, serta untuk memproduksi dan mentransformasi informasi yang relevan dengan kebijakan dan dapat digunakan dalam tatanan politik untuk mengatasi masalah kebijakan.

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah, dan diorientasikan padapemenuhankebutuhan dankepentingan masyarakat. Makna pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, sedangkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Rohman, 2016, h. 5).

Ramdhani & Ramdhani (2017, h. 3) menunjukkan bahwa kebijakan publik

adalah serangkaian keputusan pemerintah yang terukur, mengarah pada tujuan tertentu, menyangkut kepentingan publik, dan melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk memengaruhi hasil akhir suatu kebijakan. Kebijakan publik dalam penelitian ini merujuk pada peraturan daerah mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

HIV adalah adalah virus yang merusak sel-sel sistem imun yang menyebabkan kekebalan tubuh hilang, sehingga tubuh sangat mudah terserang berbagai jenis penyakit. Virus ini hidup di dalam empat cairan tubuh manusia, yaitu cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan Air Susu Ibu (ASI).

Sementara itu, AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit dan fase akhir akibat menjangkitnya HIV yang mudah menular dan mematikan. AIDS merupakan penyakit serius yang telah menyebabkan banyak penderitanya meninggal dunia. Beragam program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah telah mengacu pada perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, namun program kesehatan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan dan pencegahan penderita HIV/AIDS masih perlu dioptimalkan lagi.

Penelitian yang bermetode *action research* ini dilakukan guna meminimalkan jumlah penderita HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.

METODE

Penelitian ini didesain dengan pendekatan *action research*, yaitu suatu kerangka penelitian pemecahan masalah. Penelitian *action research* ini mendorong peneliti untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi.

Sugiyono (2010, h. 295) mengatakan bahwa semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawa masih bersifat sementara, sehingga teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Penelitian kuantitatif bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan penelitian kualitatif bersifat menemukan teori.

Oleh karena itu, pendekatan ini dipandang tepat dan memadai untuk membantu memecahkan masalah yang dikaji di lapangan. *Action research* digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan akhir penelitian, yakni komunikasi sosial dalam mendorong penetapan kebijakan publik Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan

penanggulangan HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian *action research* ini menggunakan beberapa teknik, sebagaimana dikatakan Koshy (2005, h. 68), yaitu pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan data primer dalam penelitian melalui informan dari setiap dinas yang terkait dengan masalah HIV/AIDS di Pangandaran. Kedua, observasi partisipasi (*participant observation*) untuk mengamati kegiatan keseharian informan, yaitu dinas terkait dan penggiat LSM anti HIV/AIDS di Pangandaran. Ketiga, *focus group discussion* (FGD) dengan melibatkan *stakeholder* dan para ahli, yaitu dinas kesehatan, kantor desa Pangandaran, puskesmas setempat, Komisi Penanggulangan AIDS, dan penggiat Yayasan Matahati untuk mendiskusikan hasil temuan penelitian.

Peneliti menggunakan teknik pengambilan informan dengan metode *purposive sampling* hingga peneliti dapat menetapkan enam informan. Pertama, YMA yang mewakili dinas kesehatan. Kedua, MHD yang mewakili kantor desa Pangandaran. Ketiga, ARS sebagai petugas koordinator program penanggulangan HIV/AIDS di Pangandaran yang mewakili Puskesmas Kabupaten Pangandaran. Keempat, YNI sebagai perawat di bagian layanan umum, Puskesmas Kabupaten Pangandaran. Kelima, IMN dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Barat. Keenam, AGS sebagai Ketua Yayasan Matahati, Kabupaten Pangandaran.

Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Kabupaten Pangandaran. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan data statistik yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu daerah yang memiliki angka penderita HIV/AIDS tertinggi di Jawa Barat. Penelitian telah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan pada periode Januari-Juni 2017.

HASIL

Sutaryo (2005, h. 25-26) mengungkapkan beragam jenis komunikasi sosial, yaitu komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, komunikasi satu arah, komunikasi timbal balik, komunikasi bebas, komunikasi fungsional, komunikasi individual, dan komunikasi massa. Fungsi komunikasi sosial adalah memberi informasi, memberi bimbingan, dan memberi hiburan.

Merujuk pada tinjauan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi jenis komunikasi sosial langsung, fungsional, dan massa yang terjadi di lokasi penelitian. Komunikasi sosial inilah yang ditujukan untuk mendorong munculnya kebijakan publik berupa peraturan daerah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.

Komunikasi Sosial Langsung

Bentuk komunikasi sosial langsung merupakan proses komunikasi sosial yang terjadi secara tatap muka antara komunikator dengan komunikan untuk menyampaikan tujuan yang diharapkan. Proses komunikasi langsung dalam penelitian ini melibatkan unsur-unsur komunikasi sosial. Unsur-unsur tersebut

menjadi bagian dari komunikator dalam proses komunikasi sosial ini. Komunikasi sosial yang dilakukan oleh setiap informan dari perwakilan pemerintah daerah dan dinas terkait memperlihatkan hasil koordinasi pemerintah daerah dengan beberapa dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Sosial, serta Yayasan AHF dan Matahati yang peduli tentang HIV/AIDS.

Bentuk koordinasi tersebut berupa pelibatan unsur komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek/hasil yang diharapkan, yaitu mendorong pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Pangandaran dalam menetapkan kebijakan publik berupa perda yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.

Komunikator

Unsur komunikasi sosial yang pertama adalah komunikator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran komunikator penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Peran tersebut terlihat pada setiap komunikator dari pemerintah, masyarakat, dan dinas terkait untuk berkoordinasi melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Para komunikator inilah yang kemudian menjadi informan penelitian penulis.

MHD sebagai perwakilan kantor desa Kabupaten Pangandaran selalu aktif melakukan koordinasi dengan beberapa dinas lainnya untuk berdiskusi mencari solusi yang tepat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di

Pangandaran. MHD juga menyampaikan pernyataannya pada acara pertemuan koordinasi *stakeholder* dalam rangka evaluasi dan advokasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Adanya Komisi Penanggulangan AIDS adalah sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi seluruh pihak terkait untuk mengatasi masalah ini. Dibentuknya KPA merupakan bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS. (MHD, perwakilan kantor desa Pangandaran, wawancara, 22 Agustus 2017)

Pernyataan MHD tersebut memperlihatkan salah satu upaya pentingnya komunikator dalam pelaksanaan sebuah program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui pembentukan lembaga koordinasi khusus yang menangani langsung HIV/AIDS, yaitu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Ya selain itu, kami juga aktif mengumpulkan warga melakukan sosialisasi. Ya ini penting supaya masyarakat juga peduli pada penderita HIV/AIDS, bukan menjauhi atau memandang sebelah mata, tetapi mendukung agar program pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS ini juga berhasil. Sosialisasi ini biasanya rutin sebulan sekali pas *ngumpul*in warga ya. Kami selalu menyelipkan pesan-pesan tentang pencegahan HIV/AIDS ini. (MHD, perwakilan kantor desa Pangandaran, wawancara, 22 Agustus 2017)

YMA, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, merupakan komunikator yang berkoordinasi melakukan komunikasi sosial untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS di Pangandaran. Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* yang berkolaborasi bersama LSM peduli AIDS, yaitu yayasan Matahati Pangandaran, telah melakukan langkah-



Gambar 2 Bentuk Komunikasi Sosial Langsung antara Dinas yang Terkait di Kabupaten Pangandaran

langkah preventif dan pendeteksian dini penyebaran HIV.

Kami telah membentuk beberapa Puskesmas, khususnya Puskesmas Parigi sebagai pusat layanan dan rujukan bagi para ODHA, juga pelatihan SDM yang khusus menangani kasus ODHA tersebut. (YMA, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, wawancara, 3 Mei 2017)

Gambar 2 menunjukkan bentuk komunikasi sosial langsung yang terjadi. Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan menunjukkan adanya 20 sumber daya manusia (SDM) terlatih yang tersebar di empat puskesmas sebagai pusat layanan HIV/AIDS dan IMS yang melayani konseling dan tes HIV/AIDS dan IMS.

Nah, kami juga berupaya sebaik mungkin supaya masalah ini bisa teratasi. Kalau dulu, semuanya dirujuk ke labkesda, tapi sekarang kami melakukan inovasi, yaitu pelatihan khusus kepada para SDM yang tersebar di beberapa puskesmas di Pangandaran.

Jadi, kalau ada yang berobat ke puskesmas, ada petugas yang menangani khusus, jadi sengaja ditugaskan memegang program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. (YMA, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, wawancara, 3 Mei 2017)

IMN sebagai perwakilan KPA Provinsi Jawa Barat menunjukkan analisis situasi dan kondisi serta strategi kebijakan pemerintah. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran diharapkan mempunyai peraturan daerah khusus untuk penanggulangan HIV/AIDS.

Pangandaran sebagai tujuan wisatawan, baik nasional atau mancanegara, lebih dari 2,5 juta wisatawan pada 2015, tentu saja mempunyai dampak bagi kelangsungan masyarakatnya, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Oleh karena itu, setelah kami melakukan berbagai acara pertemuan khusus dengan lembaga dan dinas terkait lainnya untuk membahas masalah serius ini, salah satu upaya preventif yang harus segera diwujudkan adalah Pemkab Pangandaran segera memiliki perda khusus tentang penanggulangan HIV/AIDS. (IMN, perwakilan KPA Provinsi Jawa Barat, wawancara, 22 Agustus 2017)

YNI sebagai salah satu perawat di puskesmas Kabupaten Pangandaran bercerita mengenai kondisi pasien yang berobat ke puskesmas tersebut.

Ya bu, kalau ODHA *tuh* ya sudah ada yang jadi koordinator khusus di puskesmas, jadi sekarang ya pengobatannya juga bisa berjalan di Puskesmas, kalau misalnya obatnya habis, ya berarti tinggal *dateng* ke puskesmas gitu. Tapi kalau jumlah pasien yang *fix*-nya sih ada di Dinkes. Tapi saya pernah, pas Juni yang lalu ada pasien ke sini, bukan warga Pangandaran tapi lagi ada di sini, *eh* hasil pemeriksaannya positif ODHA, Bu...Jadi langsung ditangani sama Pak ARS, koordinator program ODHA, selanjutnya sih saya kurang tahu. (YNI, perawat puskesmas Kabupaten Pangandaran, wawancara, 22 Agustus 2017)

Hal tersebut merupakan persoalan yang sering ditemukan di daerah tujuan wisata.

Menurut pemaparan seorang informan, di Puskesmas Pangandaran, pasien yang positif HIV/AIDS (orang dengan HIV/AIDS atau ODHA) adalah remaja yang produktif, yaitu remaja dalam rentang usia 20-30 tahun.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, pada periode Januari-Juli 2017, menunjukkan bahwa 43 orang dinyatakan positif HIV. Jumlah ini melonjak cukup drastis dibanding periode 2012-2016 dengan 61 kasus.

Berkembangnya penyebaran HIV/AIDS di kawasan wisata yang sangat potensial ini, membutuhkan adanya sistem yang menjadi dasar untuk penanggulangannya. Adanya perda penanggulangan HIV/AIDS sangat diperlukan karena selain untuk mengatur cara penanggulangan, perda itu untuk mengatur segi kebutuhan dalam rangka mencegah penyebaran HIV/AIDS. Pangandaran memiliki satu aturan yang mengatur tentang penanggulangan HIV/AIDS sebagai langkah lebih serius melawan penyebarannya. (IMN, perwakilan KPA Provinsi Jawa Barat, wawancara, 22 Agustus 2017)

AGS sebagai ketua yayasan Matahati memaparkan secara detail mengenai berbagai upaya yang telah dilakukannya untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS sebagai bentuk kepedulian kepada kawasan wisata Pangandaran.



Gambar 3 Proses Komunikasi Sosial Pihak Yayasan Matahati di Kawasan Wisata Pangandaran

Yayasan Matahati juga bermitra dengan Yayasan AHF telah merancang berbagai program berkelanjutan dalam menjaring dan mengumpulkan para ODHA. Salah satu tim dari yayasan Matahati bertugas mengatur perkumpulan ODHA tersebut dan membentuk sebuah wadah atau komunitas.

Tapi tentu upaya kami juga tidak akan berhasil maksimal kalau kami cuma pakai teknik menjemput bola. Kami juga berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah, khususnya Pemkab Pangandaran. Kami suka mengadakan pertemuan juga, suka diundang oleh berbagai dinas terkait. Ya saling berkomunikasi dan berkoordinasi saja hingga akhirnya kami pun menemukan titik cerah ya. Rencana ke depan yang kami harapkan adalah terwujudnya payung hukum yang legal dan resmi, yaitu keluarnya penetapan kebijakan publik berupa perda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Ini pasti akan sangat membantu dan berdampak positif untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS karena Pangandaran ini adalah kawasan wisata, tidak hanya lokal, tetapi juga mancanegara. Maka dari itu, perlu adanya perda. (AGS, ketua yayasan Matahati, wawancara, 21/8/2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat melihat adanya kesamaan makna dan tujuan komunikasi yang ingin dicapai para komunikator, yaitu upaya mewujudkan payung hukum yang melindungi semua lapisan masyarakat dari penyebaran HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.

Komunikasi Sosial Fungsional

Peneliti juga melihat adanya bentuk komunikasi sosial fungsional yang terjadi antarasetiap lembaga atau dinas yang terlibat, yaitu proses komunikasi yang mengarah pada isi pesan secara fungsional agar mampu mencapai hasil yang diharapkan. Setiap proses komunikasi sosial tersebut

mengarah pada tujuan untuk mendorong terbentuknya peraturan daerah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Pangandaran.

Pesan

Berbagai upaya yang dilakukan komunikator melalui komunikasi sosial bertujuan untuk menyampaikan pesan agar komunikan memahami maksud yang ingin dicapai. Gambar 4 adalah dokumentasi penelitian yang telah dilakukan penulis di Yayasan Matahati. Secara tidak langsung, terlihat pesan nonverbal berupa simbol atau isyarat tangan membentuk angka 0 sebagai ikon Yayasan Matahati untuk mewujudkan makna *Zero ODHA* di Pangandaran.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat merumuskan pesan yang ingin disampaikan para komunikator tersebut dalam proses komunikasi sosial ini. Upaya koordinasi dan kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, puskesmas, kantor desa, KPA, dan LSM (Yayasan Matahati) yang peduli terhadap HIV/AIDS telah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama.



Gambar 4 Simbol Nonverbal Berupa Isyarat Tangan yang Berarti *Zero ODHA*

Mereka saling terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Pertama, sosialisasi kepada warga desa Pangandaran di balai desa Pangandaran untuk menjelaskan tentang HIV/AIDS dan menyampaikan pesan agar tidak menghakimi dan memandang sebelah mata ODHA, tetapi justru memberikan motivasi agar ODHA bangkit dan bersemangat menghadapi hidupnya. Kedua, kegiatan pemeriksaan tes HIV/AIDS di puskesmas Kabupaten Pangandaran untuk mendeteksi sejak dini gejala HIV/AIDS bagi warga desa Pangandaran. Ketiga, kampanye anti HIV/AIDS saat Hari AIDS Sedunia yang dilakukan oleh Yayasan Matahati melalui kerja sama dengan dinas terkait lainnya.

Keempat, sosialisasi kampanye penggunaan kondom yang dilakukan oleh Yayasan AHF melalui kerja sama dengan Yayasan Matahati dan Pemkab Pangandaran sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS di Pangandaran. Kelima, layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) subsidi yang dilakukan yayasan Matahati melalui koordinasi dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada ODHA, khususnya bagi ODHA yang tidak mampu, karena layanan berbasis laboratorium membutuhkan biaya mahal. Keenam, pertemuan antara ODHA dengan Bupati Pangandaran dalam rangka memberikan dukungan kepada ODHA agar semakin termotivasi dalam menjalani hidupnya. Ketujuh, pelatihan yang dilakukan dinas kesehatan untuk para SDM yang khusus menangani program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan tersebar di beberapa puskesmas di Pangandaran,

yaitu Puskesmas Pangandaran, Cikembulan, Parigi, dan Cimerak.

Komunikasi Sosial Melalui Media Massa

Proses komunikasi sosial yang terjadi dalam penelitian ini juga merupakan bentuk komunikasi sosial media massa, yaitu proses komunikasi sosial yang menggunakan media massa dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.

Penelitian ini menunjukkan peran penting media massa, yaitu menyampaikan pesan yang diusung oleh setiap pihak, termasuk dinas terkait, untuk mendorong terwujudnya penetapan kebijakan publik berupa perda yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.

Para informan penelitian ini memanfaatkan peran media lokal *online*. Peneliti pun melakukan teknik penelitian studi dokumentasi dan penelusuran dokumen *online* mengenai pemberitaan berbagai kampanye yang telah dilakukan informan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dan Pemkab Pangandaran mengenai salah satu solusi penanganan HIV/AIDS, yaitu pewujudan perda yang mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.

Gambar 5-8 merupakan bukti bentuk komunikasi sosial media massa melalui media lokal yang digunakan oleh para informan. Hal ini menunjukkan kerja sama dengan media untuk menyampaikan pesan mendorong penetapan kebijakan publik berupa perda yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.



Gambar 5 Bentuk Komunikasi Sosial Melalui Media Online Lokal Galamedianews.com (Supriyatman, 2017)



Gambar 6 Bentuk Komunikasi Sosial Melalui Media Online Lokal Harapan Rakyat.com (Madlani, 2017)



Gambar 7 Bentuk Komunikasi Sosial Melalui Media Online Lokal Radar Tasikmalaya (Oby, 2017)



Gambar 8 Bentuk Komunikasi Sosial Melalui Media Online Lokal Pikiran Rakyat (Kusnadi, 2017)

Komunikasikan

Tiga pihak terlibat menjadi komunikan dalam proses komunikasi sosial yang terjadi. Pertama, masyarakat yang rentan HIV/AIDS, yaitu komunikan yang berisiko tertular HIV/AIDS. Orang yang rentan adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan dalam suatu lingkungan, kondisi perekonomian yang rendah, serta memiliki kondisi kesehatan yang labil, sehingga berisiko tertular dan menularkan HIV, misalnya pekerja seks komersial (PSK), waria, *gay*, dan pelanggan-pelanggan mereka yang juga ikut andil dalam penularan ke masyarakat luas.

Kedua, orang yang terinfeksi HIV/AIDS, yaitu penderita atau komunikan yang sudah tertular HIV atau yang dikenal dengan sebutan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). Langkah ini sudah dilakukan oleh Yayasan Matahati melalui pembentukan komunitas ODHA yang dapat digunakan sebagai wadah saling memotivasi dalam menjalankan hidupnya.

Ketiga, masyarakat umum, yaitu komunikan yang menjadi sasaran sekaligus *stakeholder* primer karena masyarakat umum ini merupakan kelompok yang akan berinteraksi dengan ODHA dan menjadi pihak yang diharapkan tidak memandang sebelah mata para ODHA. Masyarakat justru diharapkan dapat memberikan semangat hidup bagi para ODHA agar tetap percaya diri dan optimistis dalam menyikapi kondisi penyakit yang dialaminya.

Efek yang Diharapkan

Pangandaran sebagai salah satu kawasan wisata yang sering dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pencegahan tersebarnya HIV/AIDS kepada masyarakat luas. Para informan telah berupaya melaksanakan program kegiatan dan kampanye anti HIV/AIDS di Pangandaran. Namun, data ODHA di Pangandaran terus meningkat. Peneliti menemukan bahwa solusi yang diharapkan para informan, berbagai dinas terkait, dan Yayasan Matahati adalah terwujudnya payung hukum yang melegalkan aturan

dalam melindungi kalangan masyarakat umum agar terhindar dari penyebaran HIV/AIDS. Oleh karena itu, berbagai pertemuan yang telah digelar bersama untuk menyelesaikan masalah serius ini diharapkan dapat mendorong penetapan kebijakan publik berupa perda yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.

Berdasarkan pemaparan panjang yang telah disampaikan oleh para informan dalam penelitian ini, penulis menghasilkan temuan sebagai efek/hasil/tujuan akhir dari semua tahapan dan proses komunikasi sosial yang telah dilakukan oleh semua pihak informan. Baik Yayasan Matahati maupun dinas yang terkait lainnya menyetujui dan sepakat bahwa mereka menginginkan adanya payung hukum yang legal, yaitu penetapan kebijakan publik berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.

PEMBAHASAN

Teori komunikasi yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah teori tindakan sosial. Teori ini digunakan karena penetapan kebijakan publik tentang HIV/AIDS bagi kawasan Pangandaran merupakan sebuah tindakan sosial yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut terkait perlindungan dan legalitas hukum yang diberikan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan publik mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Pangandaran.

Weber (dalam Ritzer & Goodman, 2005) menyatakan bahwa dunia terwujud karena tindakan sosial. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukannya dan ditujukan untuk mencapai hal-hal yang mereka inginkan atau kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan. Hal ini juga terjadi pada para informan yang memutuskan melakukan tindakan mendorong kebijakan publik dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Pangandaran. Tindakan sosial ditunjukkan oleh para informan melalui proses komunikasi sosial yang mengarah pada tujuan yang diharapkan, yaitu terbentuknya kebijakan publik.

Kajian terhadap tindakan sosial digunakan pula dalam berbagai penelitian sosial dan multidisiplin ilmu lainnya. Penelitian Marston (2000), misalnya, menceritakan tentang kajian skala sosial yang memahami cara-cara skala produksi terlibat dalam produksi ruang. Marston (2000) menyatakan bahwa hal yang hilang dari diskusi tentang konstruksi skala sosial ini adalah perhatian serius terhadap relevansi reproduksi dan konsumsi sosial yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan dan memengaruhi perubahan sosial yang nyata. Berbeda pemikiran dengan penelitian tersebut, peneliti melihat bahwa tindakan sosial ini berkaitan dengan proses konstruksi sosial, tetapi fokus pada tindakan individu yang berdampak pada tindakan orang lain (Marston, 2000, h. 219).

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Weber dalam Ritzer & Goodman, 2005, h. 136). Hal ini juga terdapat dalam penelitian ini, yaitu adanya komunikasi sosial yang berulang dan dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam pembentukan kebijakan publik. Akhirnya, kesatuan dari setiap elemen komunikasi sosial ini adalah bagian dari unsur dalam teori tindakan sosial yang menghasilkan tujuan yang diharapkan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk komunikasi sosial yang meliputi komunikasi sosial langsung, komunikasi sosial menggunakan media massa, dan komunikasi sosial fungsional. Bentuk-bentuk tersebut mengarah pada pelibatan unsur-unsur komunikasi sosial. Proses komunikasi sosial yang dilakukan memperlihatkan adanya hasil koordinasi pemerintah daerah dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Budaya, serta Yayasan AHF dan Matahati yang peduli tentang HIV/AIDS. Hasil koordinasi ini dapat dilihat dalam aktivitas yang melibatkan unsur komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek yang diharapkan, yaitu mendorong Pemkab Pangandaran untuk menetapkan kebijakan publik berupa perda yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kawasan wisata Pangandaran.

Hasil penelitian juga menunjukkan temuan baru yang dapat menjadi bekal peneliti untuk melanjutkan penelitian berikutnya. Salah satunya adalah eskplorasi terhadap pandangan Pemkab Pangandaran terkait prosedur pembentukan payung hukum, yakni penetapan kebijakan publik berupa perda yang mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Pangandaran.

Saran

Upaya koordinasi dan kolaborasi pemda dengan berbagai dinas terkait, LSM yang peduli HIV/AIDS, dan partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi, khususnya terkait kesadaran dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung para ODHA untuk tetap memiliki motivasi dan semangat hidup yang lebih baik. Koordinasi yang optimal dapat didukung dengan evaluasi terhadap setiap program kegiatan koordinasi yang telah diselenggarakan, mulai dari kampanye, sosialisasi, pelatihan SDM, hingga akses pelayanan kesehatan bagi para ODHA, sehingga tingkat kelemahan yang menjadi hambatan terwujudnya *Zero ODHA*, seperti *tagline* Yayasan Matahati, dapat diketahui dan perda tersebut dapat terwujud untuk kawasan wisata Pangandaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Fritantus, Y., & Rukminingsih, N. (2015). Implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surabaya: Kajian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013, studi kasus di Puskesmas Putat Jaya, Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01), 175-183.

- Gunadi, S. (2017). Peningkatan jumlah kasus hiv di 2017, Banten waspada!! *kpakabtangerang.or.id*. <<http://www.kpakabtangerang.or.id/2017/04/05/peningkatan-jumlah-kasus-hiv-di-2017-banten-waspada>>
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Kusnadi, A. (2017). Perlu ada payung hukum untuk program penanggulangan hiv aids. *Pikiran-rakyat.com*. <<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/07/26/perlu-ada-payung-hukum-untuk-program-penanggulangan-hiv-aids-406066>>
- Koshy, V. (2005). *Action research for improving practice*. London, UK: Paul Chapman Publishing.
- Madlani. (2017). Dinkes Pangandaran harapkan perda pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. *Harapanrakyat.com*. <<http://www.harapanrakyat.com/2017/07/dinkes-pangandaran-harapkan-perda-pencegahan-dan-penanggulangan-hiv-aids/>>
- Marston, S. A. (2000). The social construction of scale. *Progress in Human Geography*, 24(2), 219-242.
- Nugroho, A. (2011). Perancangan dan implementasi sistem basis data. Yogyakarta, Indonesia: PT. Andi.
- Oby. (2017). Perda aids mendesak. *Radartasikmalaya.com* <<https://www.radartasikmalaya.com/berita/baca/22713/perda-aids-mendesak.html>>
- Purnomo, D., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. (2015). Analisis kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang: Studi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 42-48.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(01), 1-12.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2005). *Teori sosiologi modern*. Terjemahan Alimandan. Jakarta, Indonesia: Prenada Media.
- Rohman, A. T. (2016). Implementasi kebijakan melalui kualitas pelayanan penerimaan pajak daerah dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Disertasi. Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Supriyatman, A. (2017). Pangandaran butuh perda penanggulangan HIV/AIDS. *Galamedianews.com*. <www.galamedianews.com/pangandaran-butuh-perda-penanggulangan-hiv-aids.html>
- Sutaryo. (2005). *Sosiologi komunikasi*. Yogyakarta, Indonesia: Arti Bumi Intaran.
- Vera, N., & Wihardi, D. (2012). “Jagongan” sebagai bentuk komunikasi sosial pada masyarakat Solo dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 2(2), 40-46.
- Warto, W., & Rusmiyati, C. (2015). Study on Yogyakarta special territory government's policy on HIV/AIDS prevention. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 39(1), 55-66.

